

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Kode Pos : 97827 Laman www.malutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
NOMOR : 300.1.1 / 35 / KPTS/ SATPOL PP

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dimaksud, perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tentang pembentukan tim penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor (1419, 2021);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Teknis Satpol PP, Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Penghargaan Satpol PP;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 20219 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerrintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
30. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026; (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan dalam tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 Sebagaimana dimaksud diktum pertama Mempunyai Tugas:
1. **Ketua Tim :**
 - a. Memberikan pengarahan dan masukan dalam tim penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara agar mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
 - b. Megkordinir tugas sekretariat dan kelompok kerja tim penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;
 2. **Sekretaris Tim:**
 - a. Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
 - b. Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
 - c. Mengkordinir pembahasan internal rancangan awal perubahan rencana kerja satuan polisi pamong praja provinsi maluku utara tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan verifikasi bersama dengan BAPPEDA Provinsi maluku utara;
 3. **Kelompok Kerja I**
 - a. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan seketaris tim guna Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;

- b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Terkait dalam rangka sinkronisasi dengan RKPD Perubahan Provinsi Maluku Utara dan menyiapkan data-data pendukung guna efektifnya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi Indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan guna mengintegrasikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
- d. Mempersiapkan dokumen dan mengikuti kegiatan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Maluku Utara serta melakukan perbaikan dokumen atas koreksi pada forum Verifikasi;

4. Kelompok Kerja II

- a. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan sekretaris tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
- b. Menyiapkan data tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- c. Melakukan koordinasi dengan bidang - bidang internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara guna penyamaan persepsi terkait indikator kinerja serta pengumpulan data-data pendukung guna efektifnya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
- d. Melakukan pembahasan dengan bidang-bidang internal satuan polisi pamong praja provinsi maluku utara guna membahas isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025;
- e. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara terkait dengan pagu indikatif dan sumber dana;

- Ketiga Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Pertama berdasarkan Pertimbangan Kompetensi Jabatan, Beban Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
- Keempat Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, yang dibentuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum Pertama Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi,
Pada tanggal : 16 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG


Drs. H. FACHMAT DJABIR, MM
Pembina Utama Mudya
NIP. 19690127 1996031 005

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. di Sofifi Sebagai Laporan
- 2. Inspektur Inspektorat Provinsi Maluku Utara. di Sofifi
- 3. Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG.

NOMOR : 300.1.1/ 35 / KPTS / SATPOL PP
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H. Rachmat Djabir. MM Nip. 19690127 1996031 005	Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Ketua Tim
2	Djabal Badar, S.Pd Nip. 19780723 200801 1 011	Sekertaris Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Sekertaris Tim
3	Arifin Kader, SE Nip. 19820606 200604 1 019	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD	Koordinator Pokja I
4	Ahmad Fatmona, S.Sos Nip. 19690318 200112 1 001	Kepala Seksi Operasional Bidang Trantibum Linmas	Anggota Pokja I
5	Tarajuddin Sahupala, SE Nip. 19670323 200112 1 001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota Pokja I
6	Irwan Bode, SE Nip. 1978808 200801 1 006	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Pokja I
7	Wahid Takena, S.IP Nip. 19870209 201401 1 007	Pengadministrasi Data Peraturan dan Perundang - Undangan	Anggota Pokja I
8	Sofyan Abdul Motalib, SE Nip. 19671007 199603 1 005	Kabid Penanganan Kebakaran	Kordinator Pokja II
9	Wardi Amin, SH Nip. 19691120 200112 1 001	Kabid Trantibum Linmas	Anggota Pokja II
10	Lutfi Hamid Djan, S.IP Nip. 19850808 201101 1 006	Kabid Penegakan Peraturan	Anggota Pokja II
11	Benyamin Pawah, S.A Nip. 19691128 200112 1 001	Kepala Seksi Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Anggota Pokja II
12	Jufri Sangaji, S.Sos Nip. 19750828 200112 2 004	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota Pokja II

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG



Drs. H. RACHMAT DJABIR, MM
Pembina Utama Mudya
NIP. 19690127 1996031 005

KATA PENGANTAR

Sebelumnya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya yang tidak terhingga bagi kita semua sehingga dapat kita laksanakan tugas dan tanggung jawab menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan sala satu SKPD yang diwajibkan untuk menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja periode sebelumnya yang menggambarkan tentang target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran dan memuat target dan capaian kinerja serta pagu indikatif program / kegiatan Tahun 2025 serta menyampaikan proyeksi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, saya hanturkan banyak terima kasih.

Sofifi, 13 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. H. RACHMAT DJABIR, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19690127 199603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP.....	49
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pencapaian Renja dan Renstra s/d Tahun 2025...	11
Tabel 1.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Maluku Utara.....	22
Tabel 1.4	Reviu Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Program dan Kejiata.....	25
Tabel 1.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan.....	33
Tabel 1.6	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Tahun 2026, Rencana Tahun 2027....	36
Tabel 1.6	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan hal ini sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, dan memperhatikan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang berkaitan dengan arah kebijakan serta sasaran strategis Pemerintah Daerah Meningkatnya Kondusifitas Daerah, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sedangkan sistematika penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung arah kebijakan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sejalan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung pelayanan pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran sebagaimana termuat dalam dokumen rencana kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, secara umum ada yang dapat memberikan hasil yang signifikan dari target dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ada yang belum mencapai target, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut sebagian anggaran yang melekat pada program kegiatan tidak dapat direalisasikan, kondisi positif indikator yang mencapai target ini akan menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara untuk lebih meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja tahun 2026 dapat terwujud, untuk mewujudkan capaian tersebut, dibutuhkan upaya dengan cara identifikasi permasalahan, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan untuk memastikan permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum.

Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang - undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Teknis Satpol PP, Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Penghargaan Satpol PP;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5)
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 58);

1.3 Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025;
- b. Tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 Pemerintah Daerah serta menjadi tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penelahan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.

3.2. Program dan Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP.

4.1. Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif disertai dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP.

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra.

Pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui program dan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, telah mencapai target kinerja ataupun melebihi target kinerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun lalu, guna peningkatan capain kinerja program dan kegiatan yang tidak mencapai target pada rencana kerja pada tahun mendatang.

a. Analisis Realisasi Program Kegiatan Tahun 2023.

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berdasarkan Laporan Kinerja yang telah disusun, dimana terdapat tiga indikator kinerja program (otcome), seblas indikator kinerja kegiatan dan empat puluh limah Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output), secara umum dapat mencapai sesuai target kinerja serta sampai dengan 31 Desember tahun 2023 secara fisik sebesar 93 % dan realisasi keuangan sebesar 83.44%, pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

1. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS dengan indikator kinerja jumlah polisi pamong praja yang berkualitas sebagai PPNS, dengan target kinerja 20 orang namun capain 0 , Kemudian Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran pada Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri.

indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri. Dengan target kinerja 2 unit namun capain

1 unit, kemudian juga pada sub kegiatan penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan indikator kinerja jumlah dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang tersedia dengan target kinerja 1 dokumen namun capaian 0 dokumen.

2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja secara umum adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase perangkat daerah dengan nilai Lkj >80, serta Persentase Maturitas SPIP Level 3 karena sampai saat ini belum diberikan penilaian terkait dengan Indikator Kinerja tersebut, sementara untuk target indikator kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat memenuhi target sebagaimana target Rencana Kerja tahun 2023.

3. Realisasi Program Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana termuat pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2023, tidak terdapat program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja Program Kegiatan.

> Penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan disebabkan karena program dan kegiatan serta sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS tidak dilakukan realisasi anggaran sampai dengan per 31 desember tahun 2023, sementara untuk sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri dimana 1 unit kendaraan operasional tidak realisasi karena pada saat proses pengadaan kendaraan tersebut habis dipasaran sehingga batal dilakukan pengadaan.

➤ Penyebab tercapainya target kinerja program kegiatan adalah alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang telah direncanakan, serta adanya konsistensi Organisasi Perangkat Daerah dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.

Implikasi yang timbul adalah meningkatnya pelayanan publik bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran kedepan adalah perlunya peningkatan koordinasi antar instansi untuk memastikan permasalahan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan agar tepat dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

- b. Analisis Realisasi Program Kegiatan dan Proyeksi Realisasi Program Tahun 2025. Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Triwulan III, telah menggambarkan bahwa terdapat 3 indikator kinerja program (outcome) yang termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, pada tahun 2025 yang sedang terlaksana saat ini, terdapat 10 indikator kinerja kegiatan dan 30 Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output), secara umum dapat mencapai sesuai target kinerja serta sampai dengan 31 September tahun 2024, secara fisik sebesar 70 % dan realisasi keuangan sebesar 72.00%, pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel. 1.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pencapaian Renja dan Pencapaian Renstra
Sampai dengan Tahun 2025**

SATPOL PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Realisasi Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1) s/d 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sib Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2029 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4x100%)
1.05 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	295	0	0	0	0	295	295	100
1.05 . 01 . 1 . 02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
	Pengadaan pakaain dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Realisasi Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1) s/d 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2029 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4x100%)
1.05 . 01 . 1 . 05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 05 . 04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	0	0	0	0	10	10	20
1.05 . 01 . 1 . 05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	250	0	0	0	0	50	50	20
1.05 . 01 . 1 . 05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	250	0	0	0	0	50	50	20
1.05 . 01 . 1 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 06 . 02	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 06 . 03	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Realisasi Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1) s/d 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sib Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2029 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4x100%)
1.05 . 01 . 1 . 06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 06 . 11	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 07 . 02	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	25	0	0	0	0	2	2	8
1.05 . 01 . 1 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 01 . 1 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	16	0	0	0	0	16	16	100
1.05 . 01 . 1 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukumen	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 01 . 1 . 09 . 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	1	1	100

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program danKeluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Realisasi Target Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1) s/d 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sib Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2029 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4x100%)
1.05 . 01	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 02 . 1 . 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 02 . 1 . 01 . 10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Prlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	500	0	0	0	0	100	100	20
1.05 . 02 . 1 . 01 . 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Unit	100	0	0	0	0	25	25	25
1.05 . 02 . 1 . 01 . 15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 02 . 1 . 01 . 17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 02 . 1 . 02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 02 . 1 . 02 . 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 02 . 1 . 02 . 06	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumn	1	0	0	0	0	1	1	100

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Realisasi Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun n-1) s/d 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2029 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4x100%)
1.05 . 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 04 . 1 . 01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Persen	100	0	0	0	0	100	100	100
1.05 . 04 . 1 . 01 . 03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	5	0	0	0	0	1	1	20
1.05 . 04 . 1 . 01 . 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	50	0	0	0	0	10	10	20
1.05 . 04 . 1 . 01 . 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	250	0	0	0	0	50	50	20

Sumber Data: Satpol PP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas telah menggambarkan bahwa hasil evaluasi renja dan pencapaian renstra sampai dengan tahun 2025, dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, hasil evaluasi terhadap target dan capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, telah terlaksana pada tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi, dengan indikator kinerja efektifitas penyeenggaraan urusan pemerintahan provinsi, dengan target 100%, dan diproyeksikan dapat mencapai target kinerja 100%, kemudian Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja persentase penyelenggaraan tibumtranmas, dengan target 100% dan dipreyeksikan dapat mencapai target 100%, dan Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase), dengan target 100%, dan dipreyeksikan dapat mencapai target kinerja 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara berdasarkan target capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan baik Rencana Strategis maupun Rencana Kerja sebagaimana penjelasan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP
Provinsi Maluku Utara

SKPD: Satpol PP

NO	Indikator	SPM	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke	Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum			75	75	76	77	78	-	75	75	
2	Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran			75	75	76	77	78	-	75	75	
3	Persentase Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada bagi warga negara	Persentase Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada bagi warga negara		100	100	100	100	100	-	100	100	
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	77.75	88.75	89.00	89.25	89.50	-	77.75	88.75	
5	Persentase Penegakan Perda		Persentase Penegakan Perda	50	100	100	100	100	-	50	100	

Sumber Data: Renstra Satpol PP Maluku Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas telah menggambarkan target renja tahun 2025 dapat mengacu pada renstra Satpol PP tahun 2025-2029, data capain tahun 2025 belum disajikan karena masi berlangsung pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan namun telah disajikan proyeksi tahun 2025-2026 diharapkan sesuai dengan target renstra pada tahun yang sama, 5 idikator yang sebagaimana dijelaskan baik indikator kinerja utama, indikator SPM dan Indikator Kinerja Kunci dapat tercapai sesuai dengan taget renstra dapat bergantung terhadap realisasi anggaran dan konsisten terhadap target

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanakan bahwa mutu pelayanan dasar antara lain standar Jumlah dan Kualitas barang dan Jasa, Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia serta Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Optimalisasi pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat maupun Penanganan Kebakaran perlu diperhatikan beberapa isu-isu penyelenggaraan tugas yang dihadapi antara lain:

1. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang belum optimal, sementara Pemerintah daerah diminta oleh Pemerintah Pusat perlunya persamaan target capaian daerah dengan target Nasional dalam Penegakan Perda dan Perkada.
2. Peningkatan Penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada.
3. Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat.
4. Belum Terlaksananya Pendampingan Pembentukan Satgas Linmas pada Kabupaten/Kota.
5. Belum terlaksananya Pendampingan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran, Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di seluruh Kecamatan, dan Pendampingan Pembentukan Relawan Penanganan Kebakaran di Desa se Provinsi Maluku Utara.
6. Minimnya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Pencegahan dan Penanganan Kebakaran.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka melihat kebutuhan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjawab permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan pelayanan publik, berikut ini penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara baik dari sisi Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2026.

Tabel 1.4 Reviu Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
						41.775.000.000						41.775.000.000
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Sofifi	Persen	100	31.090.000.000	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Sofifi	Persen	100	31.090.000.000
	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	295.000.000	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	295.000.000
	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000
	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000
	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000
	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000
	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000
	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	25.768.000.000	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	25.768.000.000
	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sofifi	Orang	245	25.728.000.000	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sofifi	Orang	245	25.728.000.000
	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sofifi	Laporan	1	40.000.000
	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	35.000.000	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	35.000.000
	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000
	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	730.000.000	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	730.000.000
	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Sofifi	Paket	80	120.000.000	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	Sofifi	Paket	80	120.000.000
	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000
	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000
	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Orang	20	300.000.000	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Orang	20	300.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Halteng	Orang	50	130.000.000	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Halteng	Orang	50	130.000.000
	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Morotai	Orang	50	130.000.000	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Morotai	Orang	50	130.000.000
	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	1.705.000.000	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	1.705.000.000
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	15.000.000	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	15.000.000
	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	90.000.000	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	90.000.000
	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	90.000.000	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	90.000.000
	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofifi	Paket	3	1.000.000.000	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofifi	Paket	3	1.000.000.000
	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	30.000.000	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	30.000.000
	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	25.000.000	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	25.000.000
	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	400.000.000	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	400.000.000
	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000
	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sofifi	Persen	100	1.740.000.000	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sofifi	Persen	100	1.740.000.000
	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	10	300.000.000	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	10	300.000.000
	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	6	900.000.000	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	6	900.000.000
	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Paket	1	180.000.000	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Paket	1	180.000.000
	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofifi	Unit	10	180.000.000	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofifi	Unit	10	180.000.000
	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	30	180.000.000	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	30	180.000.000
	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	212.000.000	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	212.000.000
	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	12.000.000	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	12.000.000
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000
	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	120.000.000
	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	605.000.000	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	605.000.000
	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sofifi	Unit	16	190.000.000	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sofifi	Unit	16	190.000.000
	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofifi	Unit	4	190.000.000	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofifi	Unit	4	190.000.000
	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sofifi	Unit	10	45.000.000	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sofifi	Unit	10	45.000.000
	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Sofifi	Unit	1	180.000.000	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Sofifi	Unit	1	180.000.000
2	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	4.070.000.000	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	4.070.000.000
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			100			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			100	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.380.000.000	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.380.000.000
	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	8	90.000.000	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Sofifi	Dokumen		90.000.000
	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000
	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000
	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	200.000.000	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	200.000.000
	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	150.000.000	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	150.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Halsel	Laporan	4	150.000.000	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Halsel	Laporan	4	150.000.000
	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	220.000.000	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	220.000.000
	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	150.000.000
	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Sofifi	Orang	50	220.000.000	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Sofifi	Orang	50	220.000.000
	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Sofifi	Unit	100	650.000.000	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Sofifi	Unit	100	650.000.000
	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sofifi	Orang	200	270.000.000	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sofifi	Orang	200	270.000.000

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.36.000.000	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.36.000.000
	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	Sofifi	Laporan	4	110.000.000	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	Sofifi	Laporan	4	110.000.000
	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	100.000.000	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	100.000.000
	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Sofifi	Laporan	1	50.000.000	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Sofifi	Laporan	1	50.000.000
	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	120.000.000
	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000
	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	230.000.000	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	230.000.000
	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Kepulauan Sula	Dokumen	4	140.000.000	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Kepulauan Sula	Dokumen	4	140.000.000
	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000
	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Unit	30	230.000.000	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Unit	30	230.000.000
	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Sofifi	Persen	100	330.000.000	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Sofifi	Persen	100	330.000.000
	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000
	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sofifi	Laporan	1	60.000.000	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sofifi	Laporan	1	60.000.000
	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sofifi	Laporan	1	150.000.000
	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sofifi	Orang	1	80.000.000	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sofifi	Orang	1	80.000.000

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	6.615.000.000	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	6.615.000.000
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	
	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Sofifi	Persen	100	6.515.000.000	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Sofifi	Persen	100	6.515.000.000
	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Orang	50	170.000.000	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Orang	50	170.000.000
	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Ternate	Keluarga	100	320.000.000	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Ternate	Keluarga	100	320.000.000
	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Sofifi	Dokumen	1	140.000.000	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Sofifi	Dokumen	1	140.000.000
	1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Sofifi	Laporan	1	120.000.000
	1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sofifi	Dokumen	1	150.000.000	1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sofifi	Dokumen	1	150.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Sofifi	Dokumen	1	125.000.000	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Sofifi	Dokumen	1	125.000.000
	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	Sofifi	Laporan	1	150.000.000
	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Sofifi	Unit	10	4.000.000.000	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Sofifi	Unit	10	4.000.000.000
	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000
	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Laporan	1	150.000.000
	1.05.04.1.01.0032 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sofifi	Unit	5	400.000.000	1.05.04.1.01.0032 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sofifi	Unit	5	400.000.000
	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Sofifi	Orang	50	170.000.000	1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Sofifi	Orang	50	170.000.000
	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000
	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	430.000.000	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	430.000.000
	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000
	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000
	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Laporan	1	250.000.000	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Laporan	1	250.000.000

Sumber Data: Satpol PP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara telah mendapatkan usulan program/kegiatan dari unsur pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, telah dintegrasikan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Maluku Utara.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tibumtranmas	Kab. Pulau Morotai	Bimbingan Teknis Satuan Linmas Sebanyak 50 orang	Usulan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab. Pulau Morotai	Bimbingan Teknis Satuan Linmas Sebanyak 50 orang	Usulan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Pulau Morotai	Bimbingan Teknis Satuan Linmas Sebanyak 50 orang	Usulan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai

Sumber Data: Satpol PP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut telah menginformasikan bahwa terdapat usulan yang disampaikan pemangku kepentingan di Kabupaten Pulau Morotai antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar berupa bimbingan teknis Satuan Linmas sebanyak 50 orang, usulan tersebut telah sinkronkan dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara pada Tahun anggaran 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut yang merupakan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan system politik yang demokratis dan berkaedaulatan rakyat berdasarkan pancasila melalui strategis:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideology pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kamasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP.

1. Tujuan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, maka Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dapat berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

2. Sasaran

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
- Meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran.

3.3 Program dan Kegiatan.

Rumusan rencana program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026, berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, 75 sub kegiatan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Rencana Maju Tahun 2026

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)								PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
						41.775.000.000								44.482.000.000
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Sofifi	Persen	100	31.090.000.000	DAU		1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Sofifi	Persen	100	33.017.000.000
	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	295.000.000	DAU		1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	325.000.000
	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000
	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	45.000.000
	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000
	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000
	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000
	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sofifi	Dokumen	1	45.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	25.768.000.000	DAU		1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	26.976.000.000
	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sofifi	Orang	245	25.728.000.000	DAU		1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sofifi	Orang	245	26.928.000.000
	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sofifi	Laporan	1	48.000.000
	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	35.000.000	DAU		1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	41.000.000
	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000	DAU		1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	41.000.000
	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	730.000.000	DAU		1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	860.000.000
	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sofifi	Paket	80	120.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sofifi	Paket	80	150.000.000
	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000
	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000
	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Orang	20	300.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Orang	20	350.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Halteng	Orang	50	130.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Halteng	Orang	50	150.000.000
	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Morotai	Orang	50	130.000.000	DAU		1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Morotai	Orang	50	150.000.000
	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	1.705.000.000	DAU		1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	1.950.000.000
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	15.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	20.000.000
	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	90.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000
	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	90.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	100.000.000
	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofifi	Paket	3	1.000.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofifi	Paket	3	1.100.000.000
	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	30.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	35.000.000
	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	25.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	30.000.000
	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	400.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	500.000.000
	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU		1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000
	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sofifi	Persen	100	1.740.000.000	DAU		1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sofifi	Persen	100	1.950.000.000
	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	10	300.000.000	DAU		1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	10	350.000.000
	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	6	900.000.000	DAU		1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	6	1.000.000.000
	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Paket	1	180.000.000	DAU		1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Paket	1	200.000.000
	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofifi	Unit	10	180.000.000	DAU		1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofifi	Unit	10	200.000.000
	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	30	180.000.000	DAU		1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	30	200.000.000
	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	212.000.000	DAU		1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	265.000.000
	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	12.000.000	DAU		1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	15.000.000
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	50.000.000
	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU		1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	50.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	DAU		1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	150.000.000
	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	605.000.000	DAU		1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	650.000.000
	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sofifi	Unit	16	190.000.000	DAU		1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sofifi	Unit	16	200.000.000
	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofifi	Unit	4	190.000.000	DAU		1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofifi	Unit	4	200.000.000
	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sofifi	Unit	10	45.000.000	DAU		1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sofifi	Unit	10	50.000.000
	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Sofifi	Unit	1	180.000.000	DAU		1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Sofifi	Unit	1	200.000.000
2	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	4.070.000.000	DBH		1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	4.515.000.000
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			100		DBH			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			100	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100		DBH			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100		DBH			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100	

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)								PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.380.000.000	DBH		1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.624.000.000
	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	8	90.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Sofifi	Dokumen		100.000.000
	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	60.000.000
	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	240.000.000
	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	200.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	220.000.000
	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	150.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	170.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)						SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)			PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Halsel	Laporan	4	150.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Halsel	Laporan	4	170.000.000
	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	220.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	240.000.000
	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	160.000.000
	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Sofifi	Orang	50	220.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Sofifi	Orang	50	230.000.000
	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Sofifi	Unit	100	650.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Sofifi	Unit	100	744.000.000
	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sofifi	Orang	200	270.000.000	DBH		1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sofifi	Orang	200	290.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.36.000.000	DBH		1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.501.000.000
	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	Sofifi	Laporan	4	110.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	Sofifi	Laporan	4	120.000.000
	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	100.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	110.000.000
	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Sofifi	Laporan	1	50.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Sofifi	Laporan	1	55.000.000
	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	130.000.000
	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	70.000.000
	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	230.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	240.000.000
	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Dokumen	1	110.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)								PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Kepulauan Sula	Dokumen	4	140.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Kepulauan Sula	Dokumen	4	166.000.000
	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Sofifi	Dokumen	1	250.000.000
	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Unit	30	230.000.000	DBH		1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Unit	30	250.000.000
	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Sofifi	Persen	100	330.000.000	DBH		1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Sofifi	Persen	100	390.000.000
	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DBH		1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Sofifi	Dokumen	1	45.000.000
	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sofifi	Laporan	1	60.000.000	DBH		1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sofifi	Laporan	1	70.000.000
	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	DBH		1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sofifi	Laporan	1	175.000.000
	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sofifi	Orang	1	80.000.000	DBH		1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sofifi	Orang	1	100.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	6.615.000.000	PAD		1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	6.950.000.000
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100		PAD			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	
	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Sofifi	Persen	100	6.515.000.000	PAD		1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Sofifi	Persen	100	6.475.000.000
	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Orang	50	170.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Orang	50	190.000.000
	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Ternate	Keluarga	100	320.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Ternate	Keluarga	100	340.000.000
	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Sofifi	Dokumen	1	140.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Sofifi	Dokumen	1	158.000.000
	1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Sofifi	Laporan	1	127.000.000
	1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sofifi	Dokumen	1	150.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sofifi	Dokumen	1	150.000.000

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Sofifi	Dokumen	1	125.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Sofifi	Dokumen	1	136.000.000
	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	Sofifi	Laporan	1	164.000.000
	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Sofifi	Unit	10	4.000.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Sofifi	Unit	10	4.132.000.000
	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Sofifi	Dokumen	1	135.000.000
	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Laporan	1	176.000.000
	1.05.04.1.01.0032 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sofifi	Unit	5	400.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0032 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sofifi	Unit	5	500.000.000
	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	132.000.000
	1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Sofifi	Orang	50	125.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Sofifi	Orang	50	180.000.000

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)
	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	PAD		1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	105.000.000
	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	430.000.000	PAD		1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	475.000.000
	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000	PAD		1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Kabupaten/Kota	Laporan	1	115.000.000
	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000	PAD		1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000
	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Laporan	1	250.000.000	PAD		1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Laporan	1	260.000.000

Sumber Data: Satpol PP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Rumusan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Maju tahun 2026 dapat menggambarkan bahwa pagu indikatif untuk Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 sebesar Rp. 41.775.000.000 (*empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) terdiri dari pembiayaan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Rp. 31.090.000.000 (*tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta rupiah*) kemudian pembiayaan untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 4.070.000.000 (*empat miliar tujuh puluh juta rupiah*), dan pembiayaan untuk Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 6.615.000.000 (*enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah*). Sedangkan Rencana Maju tahun 2026 dapat menggambarkan bahwa pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp. 44.482.000.000 (*empat puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah*) terdiri dari pembiayaan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Rp. 33.017.000.000 (*tiga puluh tiga miliar tujuh belas juta rupiah*) kemudian pembiayaan untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 4.515.000.000 (*empat miliar lima ratus lima belas juta rupiah*), dan pembiayaan untuk Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 6.950.000.000 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Tahun 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara telah menetapkan perubahan rencana kerja dan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.7 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
						41.775.000.000		
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	Sofifi	Persen	100	31.090.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	295.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	DAU	
	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DAU	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi	Persen	100	25.768.000.000	DAU	
	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sofifi	Orang	245	25.728.000.000	DAU	
	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU	
	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	35.000.000	DAU	
	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	35.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	730.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Sofifi	Paket	80	120.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Orang	20	300.000.000	DAU	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Halteng	Orang	50	130.000.000	DAU	
	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Morotai	Orang	50	130.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Sofifi	Persen	100	1.705.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	15.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Dokumen	1	90.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	90.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofifi	Paket	3	1.000.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	30.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sofifi	Paket	1	25.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	400.000.000	DAU	
	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sofifi	Dokumen	1	30.000.000	DAU	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	25.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sofifi	Persen	100	1.740.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	10	300.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	6	900.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Sofifi	Paket	1	180.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofifi	Unit	10	180.000.000	DAU	
	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sofifi	Unit	30	180.000.000	DAU	
	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	212.000.000	DAU	
	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	12.000.000	DAU	
	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU	
	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	40.000.000	DAU	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	DAU	
	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sofifi	Persen	100	605.000.000	DAU	
	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sofifi	Unit	16	190.000.000	DAU	
	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofifi	Unit	4	190.000.000	DAU	
	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sofifi	Unit	10	45.000.000	DAU	
	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Sofifi	Unit	1	180.000.000	DAU	
2	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	4.070.000.000	DBH	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			100		DBH	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			100		DBH	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			100		DBH	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	2.380.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	8	90.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	200.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	150.000.000	DBH	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Halsel	Laporan	4	150.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	220.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Sofifi	Orang	50	220.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia (Unit)	Sofifi	Unit	100	650.000.000	DBH	
	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sofifi	Orang	200	270.000.000	DBH	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.36.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	Sofifi	Laporan	4	110.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	100.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	Sofifi	Laporan	1	50.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	50.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Sofifi	Laporan	4	230.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	DBH	

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	Kepulauan Sula	Dokumen	4	140.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Sofifi	Dokumen	1	230.000.000	DBH	
	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sofifi	Unit	30	230.000.000	DBH	
	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Sofifi	Persen	100	330.000.000	DBH	
	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Sofifi	Dokumen	1	40.000.000	DBH	
	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Sofifi	Laporan	1	60.000.000	DBH	
	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	DBH	
	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan transtibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Sofifi	Orang	1	80.000.000	DBH	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	6.615.000.000	PAD	
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100		PAD	
	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Sofifi	Persen	100	6.515.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Orang	50	170.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Ternate	Keluarga	100	320.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Sofifi	Dokumen	1	140.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Sofifi	Laporan	1	120.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Sofifi	Dokumen	1	150.000.000	PAD	

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Sofifi	Dokumen	1	125.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Sofifi	Unit	10	4.000.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sofifi	Laporan	1	150.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0032 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Sofifi	Unit	5	400.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	Sofifi	Dokumen	1	120.000.000	PAD	
	1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	Sofifi	Orang	50	125.000.000	PAD	

PERUBAHAN RENJA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG TRANSTIBUMLINMAS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)					KET/CATATAN
			LOKASI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN PAGU (Rp)	SUMBER DANA	
	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	Sofifi	Dokumen	1	100.000.000	PAD	
	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Sofifi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	430.000.000	PAD	
	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000	PAD	
	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000	PAD	
	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Laporan	1	250.000.000	PAD	

Sumber Data: Satpol PP Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Rumusan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat menggambarkan bahwa pagu indikatif untuk Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 sebesar Rp. 41.775.000.000 (*empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) terdiri dari pembiayaan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Rp. 31.090.000.000 (*tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta rupiah*) kemudian pembiayaan untuk Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 4.070.000.000 (*empat miliar tujuh puluh juta rupiah*), dan pembiayaan untuk Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 6.615.000.000 (*enam miliar enam ratus lima belas juta rupiah*).

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra Satpol PP tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara selama satu tahun, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2025. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Kordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya Renja ini kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara yang merupakan rencana tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku Utara.